



Media Title	Investor Daily		
Head Line	Pembebasan Lahan Tol Diharapkan Makin Cepat		
Date	16 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	Ean	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Pembebasan Lahan Tol Diharapkan Makin Cepat

JAKARTA – Investor jalan tol mengharapkan kehadiran kedeputian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mempercepat proses pembebasan lahan, khususnya untuk proyek jalan bebas hambatan. Kedeputian tersebut diharapkan mulai bekerja paling lambat awal 2014.

"Kami tentu sambut baik kehadiran kedeputian baru tersebut. Kami harap kedeputian ini dapat membantu mengatasi dan mempercepat proses pembebasan lahan, khususnya proyek jalan tol, baik menggunakan peraturan pertanahan yang lama maupun baru," tutur Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, baru-baru ini.

Kedeputian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 63/2013 yang ditandatangani Presiden pada 30 September 2013. Dalam perpres tersebut disebutkan bahwa kedeputian ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi.

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menyelenggarakan fungsi di antaranya merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, konsolidasi tanah, pengaturan, dan penetapan tanah instansi. Selain itu, melaksanakan pengelolaan tanah, pengaturan, dan penetapan tanah instansi, serta melakukan pembinaan teknis Penilai Tanah.

Di samping itu, kedeputian ini juga diharuskan melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, mengatur dan menetapkan hak atas tanah untuk instansi untuk kepentingan umum dan hak atas tanah instansi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPN dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Fachrur menegaskan, tugas-tugas yang dipercayakan kepada kedeputian baru tersebut harus segera dilaksanakan dengan dimulai dari membenahan internal di BPN serta menyiapkan sumber daya manusianya. Kedeputian ini juga diharapkan sudah mulai bertugas paling lambat awal 2014. "Apalagi, untuk proyek tol yang belum selesai pembebasan lahannya, harus sudah dituntaskan sebelum akhir 2014," tandas dia.

Masa Transisi

Sementara itu, Koordinator Kompartemen Tol Dalam Pelaksanaan ATI Tri Agus Rianto menambahkan, UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sudah berjalan untuk proyek-proyek baru. Namun, untuk proyek-proyek yang sudah berjalan dengan menggunakan acuan undang-undang pertanahan yang lama, perlu segera dituntaskan melalui masa transisi. "Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan harus fleksibel dan tidak terlalu kaku dengan aturan baru," kata dia.

Apalagi, sambung Tri Agus, lahan yang akan dibebaskan juga akan menjadi milik pemerintah. Karena itu, uang ganti rugi kepada pemilik lahan

juga harus wajar dengan menggunakan patokan harga dari tim independen atau *appraisal*.

Kendati demikian, dia meragukan proses pembebasan lahan bisa lebih cepat dengan kehadiran kedeputian baru di BPN ini. Sebab, hingga saat ini tim tersebut belum tersosialisasi dengan baik, pembentukan tim dan organisasi pengadaan lahan belum jelas. "Maka dari itu, perlu direkrut sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang jelas," tegas dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Abdul Hadi menyambut baik kehadiran kedeputian tersebut dan diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan lahan, khususnya untuk proyek jalan tol. Apalagi selama ini proses pembebasan lahan menjadi kendala terberat dalam merealisasikan jalan bebas hambatan.

"Kendala tanah memang berat dan itu kewajiban pemerintah. Namun, kami optimistis kendala itu bisa diatasi dengan cara keroyokan, baik pemerintah yang diwakili oleh panitia pengadaan tanah dan tim pengadaan tanah maupun investor jalan tol itu sendiri," papar dia.

Bahkan, sambung Abdul Hadi, pihaknya juga membentuk tim dari internal perusahaan yang bertugas membantu pemerintah percepat pembebasan lahan. Maka dari itu, proses konstruksi tiap jalan tol yang dibangun perusahaan pelat merah ini bisa segera direalisasikan meski pembebasan tanah baru 75%. "Sudah kami buktikan begitu tanah bebas, selama 12 bulan konstruksi bisa diselesaikan," ujar dia. (ean)